



Kota Yogyakarta Bersih dari Korupsi

Pemakaian Teknologi Informasi Tak Beri Ruang Kecurangan

YOGYAKARTA, KOMPAS — Hasil survei Transparency International Indonesia yang menyatakan Yogyakarta sebagai kota bersih dari korupsi disambut gembira. Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X berharap apa yang ada dalam survei itu benar-benar sebagai suatu realitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh DEFRI WERDIONO

"Di samping senang dan terima kasih. Harapan saya, beban masyarakat bisa turun, tetapi juga kondisi pegawai negeri sipilnya lebih baik," kata Sultan singkat, usai melakukan peletakan batu pertama gedung Pusat Pengendalian dan Operasional Bencana Alam DIY, di Jalan Kenari, Yogyakarta, Kamis (22/1).

Beberapa saat sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto yang ikut hadir pada acara ini berharap jajarannya bisa mempertahankan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas yang telah berjalan. Selain pegawai, menurut Herry, dukungan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya.

"Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang didukung masyarakat. Dalam arti, kalau ada yang tidak benar, ya masyarakat harus berani melapor. Selain itu, jika pemerintah sudah benar jangan sampai masyarakat justru mengajak salah," tutur Herry.

Menurut Herry, Dinas Perizinan yang mulai aktif sejak 2006 bisa menjadi baik dan disambut baik oleh masyarakat karena didukung Unit Pengolah Pengaduan Informasi dan Keluhan (UPPIK).

Semua masyarakat yang menemui kendala dalam pengurusan izin bisa menyampaikan keluhannya melalui layanan ini. Untuk memaksimalkan fungsi UPPIK, tahun ini Herry akan menambah nomor baru berikut penanganan khusus terhadap keluhan yang masuk.

Tiga kriteria

Herry yang baru saja masuk 10 besar tokoh yang menggerakkan daerah, versi salah satu majalah, mengatakan ada tiga kriteria be-

bas korupsi dalam sebuah lembaga perizinan, yakni pelayanan tepat waktu, kepastian biaya, serta kepastian hukum dan aturan main.

Ditemui terpisah, Sekretaris Dinas Perizinan Hardono yang didampingi Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Dodit Sengeng M dan Kepala Bidang Pelayanan Sutarto, mengungkapkan transparansi Dinas Perizinan Ko-

ta terjadi mulai dari antrean, semua proses perizinan, hingga penyerahan hasil kepada pemohon. Bahkan, bentuk fisik kantor sengaja dibuat dari kaca bening untuk menjamin pegawai tak berbuat macam-macam.



Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang didukung masyarakat.

Herry Zudianto

Yang membedakan Dinas Perizinan Kota dengan tempat lain adalah penggunaan teknologi yang tersistem dan pelayanan paralel (lebih dari satu izin dan bisa selesai dalam waktu yang sama). Teknologi informasi dipakai sejak dari nomor antrean hingga semua proses di dalamnya sehingga tidak memberi peluang adanya kecurangan.

"Dengan IT (*information technology*) apa yang kurang bisa didekati. Misalnya, jika ada yang terlambat, maka kepala dinas bisa mengetahui. Contohnya, pengurusan izin mestinya 20 hari jadi, tetapi berlarut sampai 25 hari. Terlambatnya ada di mana itu bisa diketahui," tutur Dodit.

Survei Persepsi Korupsi Indonesia, 2008

- Indeks Persepsi Korupsi adalah pengukuran tingkat korupsi dari pemerintah daerah. Indeks ini merupakan hasil pengolahan data dari survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TI-Indonesia)
- Tahun 2008, TI-Indonesia melakukan survei di 50 kota di Indonesia, terdiri dari 33 ibu kota provinsi dan 17 kota yang signifikan secara ekonomi menurut data Badan Pusat Statistik.
- Nilai IPK ditampilkan dalam bentuk skor, dengan rentang 0-10. Skor 0 berarti dipersepsikan sangat korup dan 10 sangat bersih.

Sepuluh Besar Teratas

Yogyakarta	6,43
Palangkaraya	6,10
Banda Aceh	5,87
Jambi	5,57
Mataram	5,41
Surakarta	5,35
Tasikmalaya	5,12
Banjarmasin	5,11
Samarinda	5,03
Pangkal Pinang	5,03

Sepuluh Besar Terbawah

Cirebon	3,82
Pontianak	3,81
Bandung	3,67
Padang Sidempuan	3,66
Pekanbaru	3,55
Purwokerto	3,54
Kendari	3,43
Manokwari	3,39
Tegal	3,32
Kupang	2,97

Sumber: Transparency International Indonesia



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dharma Wanita Persatuan			

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005